



## **LAPORAN KINERJA**

### **PUSAT SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pemeriksaan Keuangan Negara (PUSERBANG)**

**Triwulan II**

**Tahun 2023**

**INDEPENDENSI - INTEGRITAS – PROFESIONALISME**

## Kata Pengantar

Alhamdulillah kami panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat (Puserbang) Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Puserbang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Puserbang, serta penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja.

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Puserbang) mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara Pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan pengembangan portfolio dan aspek-aspek strategis di Bidang Kediklatan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puserbang turut mendukung visi BPK yang telah dicanangkan dalam Renstra BPK 2020–2024 yaitu “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Puserbang, proses pendidikan dan pelatihan pegawai BPK RI serta sertifikasi dan akreditasi ke depannya semakin baik dan efektif, sehingga dapat mempercepat pencapaian visi dan misi BPK RI, dengan demikian keberadaan BPK RI benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Puserbang ini kami ucapkan terima kasih, dengan harapan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang.

**Jakarta, 31 Juli 2023**  
**Kepala Pusat Sertifikasi dan Pengembangan**  
**Diklat PKN**

*ttd*

**Satrio Hari Nugroho** ✕  
**NIP 197401111993031003**

# Bab I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan unit kerja eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) sebagai salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, mengevaluasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan pengembangan portofolio dan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

Sejalan dengan tujuan BPK “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”, Puserbang menetapkan tujuan, yaitu: “Meningkatnya Evaluasi, Sertifikasi, dan Akreditasi yang Berkualitas, Bermanfaat, dan Terpercaya”. Puserbang melaksanakan mekanisme sertifikasi, akreditasi, evaluasi dan pengembangan diklat yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya diklat yang terstandarisasi, dengan kualitas yang terjaga, dapat memenuhi kepuasan peserta diklat dan mencapai target kinerja organisasi.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Puserbang adalah “Meningkatnya sertifikasi, akreditasi serta evaluasi dan pengembangan diklat yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya”. Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Puserbang yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Sasaran strategis penting karena mendorong penetapan prioritas, alokasi sumber daya, persyaratan kemampuan dan aktivitas penganggaran. Sertifikasi, akreditas, evaluasi dan pengembangan diklat menjadi strategis karena mengembangkan sumber daya manusia dengan cara yang berdampak pada kinerja organisasi.

Isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara antara lain:

- a. Perlunya pemantapan metode pengolahan data evaluasi level 3 dan 4 yang memberi nilai bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara belum dilaksanakan.
- c. Kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan diklat berupa kajian-kajian terkait kediklatan belum optimal.
- d. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola evaluasi, sertifikasi, akreditasi, dan pengembangan belum mencukupi.
- e. Perlunya peningkatan tata kelola, antara lain: peningkatan TI, penerapan manajemen risiko untuk mendukung proses bisnis organisasi.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, mengevaluasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan pengembangan portofolio dan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, terdiri atas:

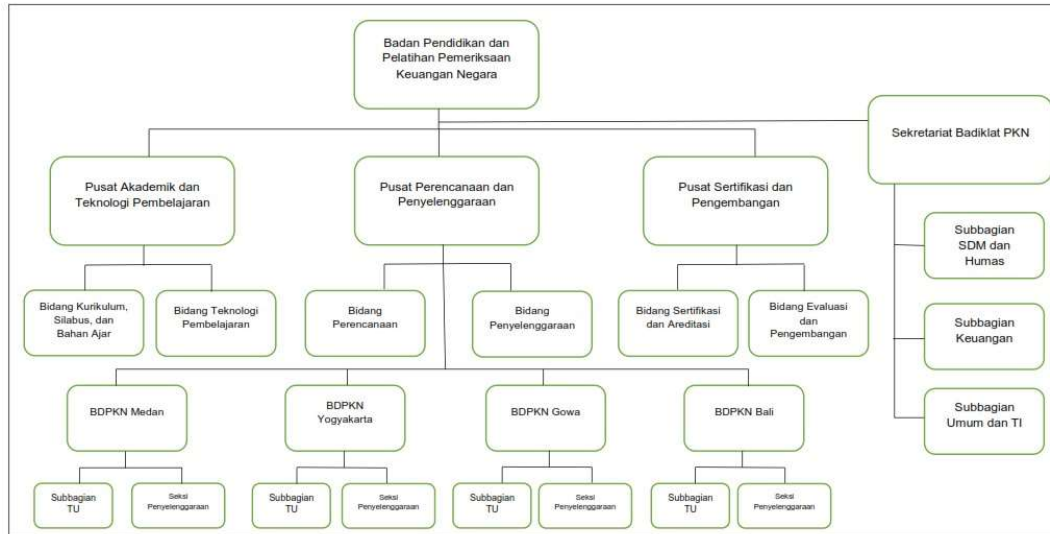
- a. Bidang Sertifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyusun pedoman dan melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, menyusun pedoman dan melaksanakan akreditasi bagi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola penjaminan mutu dan rapor kediklatan, mengembangkan portofolio pendidikan dan pelatihan, mengembangkan metode pembimbingan, mengembangkan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengembangkan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan lainnya, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. penyusunan pedoman dan pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;
- d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- e. pelaksanaan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- f. pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan;
- g. pengembangan portofolio pendidikan dan pelatihan;
- h. pengembangan metode pembimbingan;
- i. pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- j. pengembangan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan;
- k. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

- I. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PusatSertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

### C. Struktur Organisasi



Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat merupakan salah satu satuan kerja di bawah Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, terdiri atas:

- a. Bidang Sertifikasi dan Akreditasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- b. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan oleh seorang Kepala Bidang.

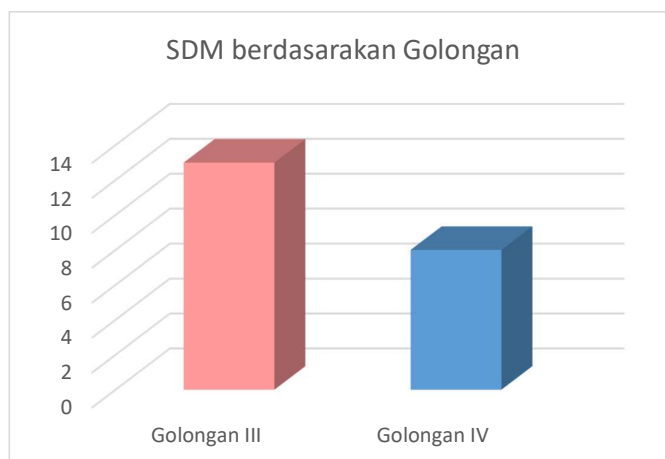
### D. Sumber Daya

#### 1. Sumber Daya Manusia

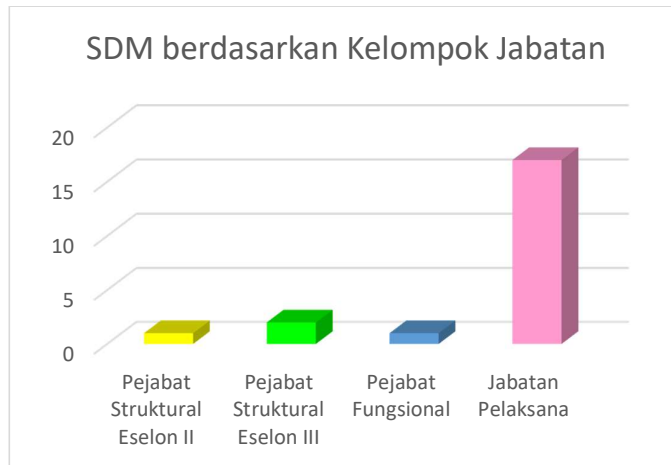
Keseluruhan jumlah SDM Badiklat dhi. Puserbang PKN BPK per Juni tahun 2023 adalah 21 yang terbagi menjadi:

- a. Berdasarkan Golongan/Ruang jabatan :

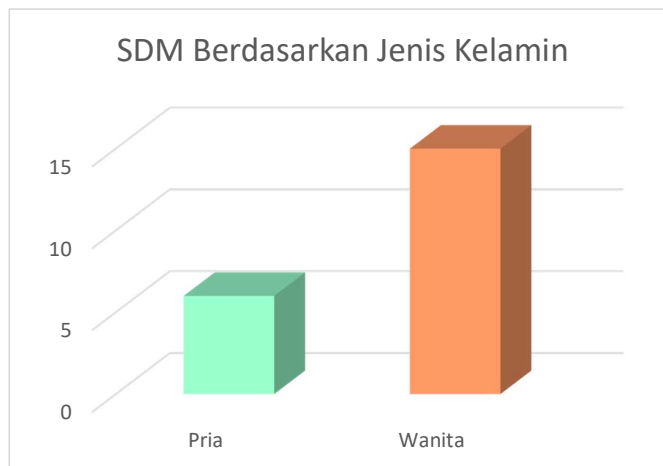
- Golongan III : 13
- Golongan IV : 8



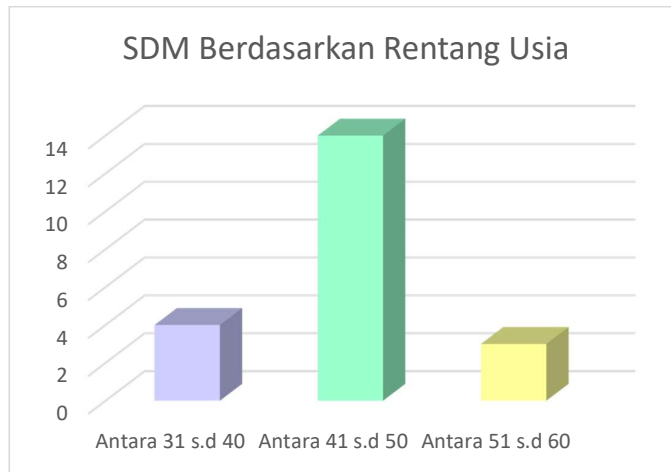
- b. Berdasarkan Kelompok Jabatan:
- Pejabat Struktural Eselon II : 1
  - Pejabat Struktural Eselon III : 2
  - Pejabat Fungsional : 1
  - Jabatan Pelaksana : 17



- c. Berdasarkan Jenis Kelamin:
- Pria : 6
  - Wanita : 15

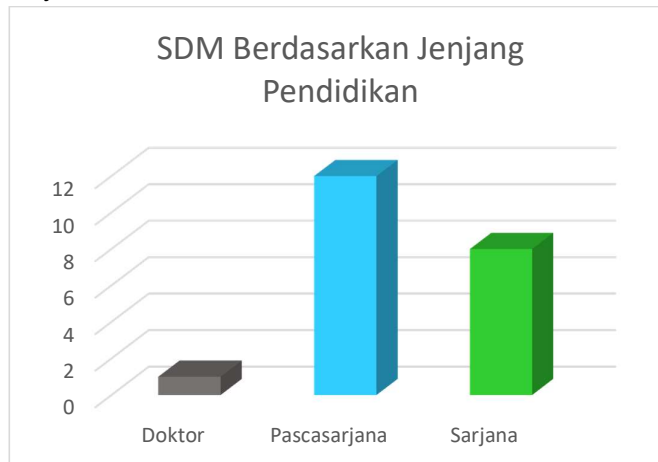


- d. Berdasarkan rentang usia:
- Antara 31 s.d 40 Tahun : 4
  - Antara 41 s.d 50 Tahun : 14
  - Antara 51 s.d 60 Tahun : 3



e. Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

- Doktor : 1
- Pascasarjana : 12
- Sarjana : 8



## 2. Sumber Daya Keuangan

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Layanan Akreditasi dan Sertifikasi Eksternal	373.633.000	0	0%
Sertifikasi Profesi	906.370.000	180.485.562	19,91%
Uji Kompetensi Teknis	533.384.000	98.705.600	18,51%
Evaluasi Pembelajaran	778.616.000	239.175.000	30,72%
Penjaminan Mutu Kediklatan	285.011.000	79.786.500	27,99%
Pengembangan Kediklatan Berkelanjutan	266.242.000	30.404.000	11,42%
Manajemen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat	136.683.000	3.150.000	2,30%
<b>Total</b>	<b>3.279.939.000</b>	<b>631.706.662</b>	<b>19,26%</b>

#### **E. Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara antara lain:

- a. Perlunya pemantapan metode pengolahan data evaluasi level 3 dan 4 yang memberi nilai bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara belum dilaksanakan.
- c. Kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan diklat berupa kajian-kajian terkait kediklatan belum optimal.
- d. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola evaluasi, sertifikasi, akreditasi, dan pengembangan belum mencukupi.
- e. Perlunya peningkatan tata kelola, antara lain: peningkatan TI, penerapan manajemen risiko untuk mendukung proses bisnis organisasi.



## Bab II Perencanaan Kinerja

### A. Perencanaan Strategis

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024: “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK yang terdiri dari:

1. Independensi  
Kebebasan dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasai dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab.
2. Integritas  
Mengedepankan sikap yang jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
3. Profesionalisme  
Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

***“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.***

Untuk mendukung Tujuan BPK tersebut, Badiklat menetapkan tujuan sebagai berikut:

***“Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas, Bermanfaat, dan Tepercaya”.***

Puserbang menetapkan sasarannya untuk mendukung strategi 4 BPK yaitu “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara”. Sasaran yang ingin dicapai Puserbang yaitu:

***“Meningkatnya Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas, Bermanfaat, dan Tepercaya”.***

Sejalan dengan tujuan BPK, Puserbang menetapkan tujuan, yaitu:

***“Meningkatnya Evaluasi, Sertifikasi, dan Akreditasi yang Berkualitas, Bermanfaat, dan Tepercaya”.***

Puserbang melaksanakan mekanisme sertifikasi, akreditasi, evaluasi dan pengembangan diklat yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya diklat yang

terstandardisasi, dengan kualitas yang terjaga, dapat memenuhi kepuasan peserta diklat dan mencapai target kinerja organisasi.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Puserbang adalah “Meningkatnya sertifikasi, akreditasi serta evaluasi dan pengembangan diklat yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya”. Dengan Sasaran Strategis tersebut, Puserbang ingin memastikan bahwa dengan Meningkatkan Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan maka tujuan untuk mewujudkan pusat unggulan Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara akan tercapai. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sertifikasi dan akreditasi Pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kualitas pengembangan Pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis, Puserbang menetapkan indikator- indikator sebagai berikut: (1) Tingkat pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi dan perangkat akreditasi; (2) Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi; (3) Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan; (4) Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan; (5) Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat; (6) Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN; (7) Indeks implementasi nilai dasar BPK; (8) Hasil evaluasi AKIP; (9) Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi; (10) Tingkat penerapan manajemen pengetahuan; (11) Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi; (12) Tingkat kinerja implementasi anggaran.

## B. Target Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022**  
Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Sasaran Kegiatan dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas, Bermanfaat, dan Terpercaya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Sertifikasi dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>• Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>	Rp3.479.939.000	1	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi	100%
		2	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi	100%
		3	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan	100%
		4	Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan	100%
		5	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	Memuaskan (3,60)

Sasaran Kegiatan dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
		atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat	
		6 Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN	Sangat Memuaskan (4,30)
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		12 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Triwulan I:

- Perencanaan dan penyusunan instrumen kegiatan Sertifikasi, Akreditasi, Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pengembangan Kediklatan dan Pengembangan Kompetensi
- Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Akreditasi, Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi
- Pelaporan Kegiatan Sertifikasi dan Evaluasi

Triwulan II:

- Penyusunan instrumen kegiatan Akreditasi, Penjaminan Mutu dan Pengembangan Kediklatan
- Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi
- Pelaporan Kegiatan Sertifikasi dan Evaluasi

Triwulan III:

- Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Akreditasi, Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pengembangan Kediklatan dan Pengembangan Kompetensi
- Pelaporan Kegiatan Sertifikasi dan Evaluasi

Triwulan IV:

- Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Akreditasi, Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pengembangan Kediklatan dan Pengembangan Kompetensi
- Pelaporan Kegiatan Sertifikasi, Akreditasi, Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pengembangan Kediklatan

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Itama, atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Puserbang mendapatkan nilai sebesar 90,29 dengan predikat AA (Memuaskan).

Penjelasan hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Perencanaan Strategis
    - 1) Puserbang telah menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan serta telah dipublikasikan pada Portal Internal Badiklat PKN.
    - 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil.
    - 3) Program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra telah selaras, relevan, dan cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
    - 4) Renstra Puserbang telah selaras dengan Renstra Badiklat PKN.
    - 5) Sasaran yang dimuat dalam Renstra telah dipetakan/diidentifikasi pada setiap kegiatan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
    - 6) Renstra telah direviu secara berkala di antaranya penyesuaian target setiap tahunnya pada PK.
  - b. Perencanaan Kinerja Tahunan
    - 1) Puserbang telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan berupa PK. PK telah menyajikan Indikator Kinerja (IK) dan telah dipublikasikan pada Portal Internal Badiklat PKN.
    - 2) Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
    - 3) PK telah mencantumkan anggaran sebesar Rp3.263.658.000,00 yang dirinci untuk setiap sasaran dan telah selaras dengan Renstra Puserbang.
    - 4) RA telah mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
    - 5) PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat Eselon III dan IV.
2. Pengukuran Kinerja
  - 1) Puserbang telah memiliki IK dan Indikator Rincian Output (IRO) sebagai ukuran kinerja secara formal serta telah dipublikasikan pada Portal Internal Badiklat PKN.
  - 2) Pengukuran kinerja sampai dengan level Eselon II telah dilakukan secara berkala dengan suatu mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan aplikasi PRISMA.
  - 3) Hasil pengukuran capaian kinerja telah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian reward and punishment.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan individu masih dilakukan secara tahunan.
3. Pelaporan Kinerja
  - 1) Puserbang telah menyusun LAKIN dan disampaikan tepat waktu serta telah dipublikasikan pada Portal Internal Badiklat PKN.

- 2) LAKIN telah menyajikan seluruh pencapaian kinerja dan informasi kinerja yang diperjanjikan dalam PK.
- 3) LAKIN telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output. Sasaran kegiatan ini merupakan dukungan pencapaian Sasaran Program Eselon I yang berorientasi outcome.
- 4) LAKIN telah menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu.

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pemenuhan pelaporan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kinerja adalah:

- 1) LAKIN baru menyajikan 50% sasaran yang dievaluasi dan analisis capaiannya.
  - 2) LAKIN telah menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun berjalan, antara realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya, namun belum menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra.
  - 3) LAKIN belum menyajikan informasi tentang penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, TI dan Sarpras).
4. Evaluasi Internal
- 1) PUserbang telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja, evaluasi program/kegiatan, evaluasi atas pelaksanaan RA.
  - 2) Dokumentasi proses dan hasil evaluasi berupa kesimpulan atas keberhasilan/kegagalan kegiatan telah dituangkan dalam bentuk rapat pembahasan, penyajian dalam LAKIN secara berkala dan dalam bentuk notulensi.
5. Capaian Kinerja
- Puserbang memperoleh nilai untuk kinerja sasaran yang bersifat output sebesar 16,47 dari bobot sebesar 20,00 atau 82,35%.
- Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran/kinerja sebagai berikut.
- 1) Terdapat satu target tahun berjalan yang tidak tercapai, yaitu IK 7.
  - 2) Terdapat delapan capaian kinerja tahun berjalan yang tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu IK 1, IK 2, IK 5, IK 6, IK 7, IK 9, IK 10 dan IK 11.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan di atas, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Kepala Puserbang agar melakukan perbaikan terhadap implementasi komponen SAKIP mendatang dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Pengukuran Kinerja
 

Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV dan individu secara berkala.
2. Pelaporan Kinerja
 

Meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan:

  - a. Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja.
  - b. Meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra untuk seluruh indikator kinerja
  - c. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja
3. Capaian Kinerja

Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

4. Mendokumentasikan proses tindak lanjut dari rekomendasi sehingga menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama.

Upaya perbaikan yang dilakukan Puserbang dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM:
  - a. Mengikuti forum terkait pembahasan capaian kinerja yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMK;
  - b. Penyusunan anggaran direviu dan dianalisis oleh Direktorat PSMK;
  - c. Melaksanakan penjaminan mutu dengan melibatkan Biro SDM sebagai anggota komite penjamin mutu dan Tim Audit Penjaminan Mutu;
  - d. Berkoordinasi dengan Biro SDM terkait Hasil Penilaian Latsar CPNS Tahun 2022;
  - e. Melibatkan narasumber dari Biro SDM dalam penyusunan pedoman dan soal ujian sertifikasi.
2. Meningkatkan kualitas penyajian LAKIN Tahun 2022 dengan:
  - a. Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja.
  - b. Meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra untuk seluruh indikator kinerja
  - c. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja
3. Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar sebesar 100,16%, dengan demikian mengalami peningkatan 0,11% dibandingkan tahun 2021 dengan skor kinerja sebesar 100,05%. Atas capaian Tahun 2022, capaian IKU yang mengalami peningkatan, yaitu Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat sebesar 105% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 100%.

## **B. Capaian Kinerja**

Selama Triwulan I Tahun 2023 Puserbang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Penyelenggaraan ujian sertifikasi
2. Pelaksanaan pre-/post-test dan ujian mata pelatihan
3. Pemanfaatan aplikasi Jasmin dan SISDM dalam pelaksanaan tugas
4. Pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif
5. Pengelolaan anggaran

Pada Triwulan I Tahun 2023, skor kinerja Puserbang sebesar 100,16% Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,05%. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Dari gambar di atas capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebesar 22,91%. Capaian Tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian Triwulan II Tahun 2022 sebesar 38,31%. Atas capaian Tahun 2023, capaian IKU yang mengalami peningkatan, yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Capaian Kinerja Puserbang diukur berdasarkan pencapaian atas 12 IKU yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Puserbang Triwulan I Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi	40%	13,16%	32,89%
2	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi	50%	50%	100%
3	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan	37,5%	0%	100%
4	Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan	37,5%	0%	100%
5	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat	-	-	-
6	Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN	-	-	-
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-
8	Hasil Evaluasi AKIP	-	-	-
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	50%	98,73%	105%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25%	37,5%	105%

No.	Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
11	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	70%	105%	100%
12	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	94,36%	105%
<b>Skor Kinerja</b>			<b>22,91%</b>	

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi

Tingkat Pemenuhan adalah ketercapaian antara program sertifikasi yang diselenggarakan dengan program sertifikasi yang ditetapkan oleh Badiklat PKN serta kegiatan akreditasi yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh Badiklat PKN terhadap peserta dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Akreditasi adalah salah satu bentuk sistem jaminan mutu berupa suatu bentuk pengakuan terhadap suatu obyek akreditasi melalui metode tes tertentu dan mengeluarkan sertifikat resmi atas suatu yang telah memenuhi standar. Akreditasi diperuntukkan bagi penyelenggara diklat pemerintah dan lembaga diklat swasta yang akan melaksanakan diklat pemeriksaan keuangan negara. Kegiatan akreditasi dilaksanakan sesuai permintaan dari lembaga diklat baik internal dan eksternal.

Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa Puserbang telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi sesuai dengan yang direncanakan. Pengukuran dilaksanakan dengan menggabungkan perbandingan jumlah program sertifikasi yang dilaksanakan dengan total jumlah program sertifikasi yang direncanakan serta perbandingan jumlah program akreditasi yang dilaksanakan dengan total jumlah program akreditasi yang direncanakan. Kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan dapat berupa:

- 1) Sertifikasi Profesi;
- 2) Workshop Sertifikasi Profesi;
- 3) Sertifikasi Keahlian;
- 4) Sertifikasi Jabatan;
- 5) Sertifikasi Eksternal;
- 6) Akreditasi Penyelenggaraan Diklat PKN.

Setiap pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan kegiatan yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan untuk indikator terkait.

Perkembangan Teknologi dan Informasi menyebabkan terjadi pergeseran metode pelaksanaan ujian sertifikasi dari penyelenggaraan ujian secara luring menjadi penyelenggaraan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom atau kombinasi luring dan daring.

Selama Triwulan II Tahun 2023 Puserbang merencanakan 3 (tiga) kegiatan sertifikasi. Rincian kegiatan sertifikasi dan akreditasi selama Tahun 2022, yaitu:

Ujian sertifikasi CSFA:

- a. Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- b. Ujian Susulan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- c. Ujian Remedial Sertifikasi CSFA Batch I s.d VII.



**Tabel 5. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi Triwulan II Tahun 2020-2024**

IKU. 1 Tingkat Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	25%	20%	20%	40%	100%
Realisasi *)	33,33%	50%	23,33%	13,16%	
Capaian	105%	105%	100,03%	32,89%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	33,33%	50%	23,33%	13,16%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 13,16% dari target sebesar 40%, sehingga capaiannya sebesar 32,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 belum memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan jadwal penyelenggaraan sertifikasi jabatan (Uji Kompetensi Teknis). Jadwal pelaksanaan sertifikasi jabatan ditentukan berdasarkan permintaan dari Biro SDM. Tahun 2022 penyelenggaraan sertifikasi jabatan dilaksanakan pada Triwulan II sehingga jumlah penyelenggaraan sertifikasi lebih tinggi.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi Puserbang akan berupaya meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi belum memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Terkait capaian ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.813.387.000 dengan realisasi sebesar Rp279.191.162 atau 15,39%.

## 2. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi

Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi adalah ketercapaian antara penyelenggaraan evaluasi yang ditetapkan oleh Puserbang dengan yang telah dilaksanakan. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, dalam hal ini penyelenggaraan diklat, sertifikasi dan akreditasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian antara penyelenggaraan evaluasi dan ketersediaan evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan. Metode untuk mengukur indikator ini, yaitu dengan membandingkan jumlah penyelenggaraan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah penyelenggaraan evaluasi yang direncanakan. Badiklat PKN mengadopsi Model Evaluasi Kirkpatrick dengan melaksanakan 4 (empat) level Evaluasi diklat yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Evaluasi Diklat Level 1;
- 2) Evaluasi Diklat Level 2;
- 3) Evaluasi Diklat Level 3;
- 4) Evaluasi Diklat Level 4.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadi perubahan metode pembelajaran dari secara tatap muka menjadi secara daring. Badiklat mulai menerapkan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan mengembangkan aplikasi untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, antara lain e-learning dan self learning. Pergeseran metode tersebut mempengaruhi metode pelaksanaan evaluasi yang juga harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi, seperti ujian secara daring dengan menggunakan aplikasi LMS dan zoom, pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner elektronik atau googleform, atau penggunaan file sharing seperti google drive untuk memudahkan penyebaran file yang beragam dan bervolume besar, dan koordinasi antaranitia penyelenggara memanfaatkan aplikasi media sosial untuk berkomunikasi secara efektif.

Transformasi Badiklat menjadi BPK Corpu pada Tahun 2021 memberi pengaruh terhadap metode pembelajaran dengan mengadopsi model 70% experiential learning, 20% social learning dan 10% formal learning. Hal tersebut diwujudkan dengan merancang desain pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran di kelas secara jarak jauh dan on-the-job training. Dengan metode tersebut, maka metode evaluasi memerlukan penyesuaian untuk dapat mengukur hasil pembelajaran peserta secara optimal.

Puserbang menyelenggarakan Evaluasi Level 1 dan Level 2 pada setiap diklat dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya dalam laporan bulanan evaluasi level 1 dan level 2. Pada Tahun 2022 Puserbang telah melaksanakan Evaluasi Level 1 s.d 4 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Evaluasi Level 1 sebanyak 6 laporan bulanan;
- 2) Evaluasi Level 2 sebanyak 6 laporan bulanan.

**Tabel 6. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 2 Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	50%	50%	50%	100%
Realisasi *)	100%	50%	50%	50%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	50%	50%	50%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 50% dari target sebesar 50%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan I Tahun 2023 telah memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan/didukung oleh antara lain:

1. Komitmen dan usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan terlaksananya evaluasi dalam setiap pelatihan;
2. Partisipasi peserta pelatihan dalam memberikan respon atas pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan;

3. Ketersediaan pengajar untuk menyusun soal untuk pelaksanaan pre-test/post-test dan ujian serta untuk memutakhirkan bank soal;
4. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu LMS, aplikasi zoom meeting dan googleform untuk memfasilitasi pelaksanaan evaluasi pelatihan serta aplikasi whatsapp untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan panitia penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan realisasi yang sesuai peruntukan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi Puserbang akan berupaya:

1. Menambah SDM untuk memaksimalkan penanganan kegiatan evaluasi;
2. Mengembangkan aplikasi SISKIKLAT untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi hasil pelaksanaan evaluasi;
3. Melaksanakan FGD untuk memfasilitasi koordinasi dengan narasumber terkait penyediaan soal dan pemutakhiran bank soal;
4. Meningkatkan koordinasi dengan panitia penyelenggara diklat untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi;
5. Penajaman dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi telah memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Terkait capaian ini dialokasikan anggaran sebesar Rp778.616.000 dengan realisasi sebesar Rp239.175.000 atau 30,72%.

3. Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan  
Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan adalah ketercapaian antara kegiatan pemenuhan pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan yang ditetapkan dengan yang telah dilaksanakan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian atas pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan sesuai dengan yang direncanakan. Metode untuk mengukur indikator ini, yaitu dengan membandingkan jumlah pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan yang telah dilaksanakan dengan jumlah pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan yang direncanakan.

Selama Triwulan II Tahun 2023 kegiatan penjaminan mutu terdiri dari:

1. Penilaian/reviu atas kualitas komponen-komponen penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Badiklat PKN selama pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2023 yang sedang berjalan dan akan berakhir pada Agustus 2023. Hasil penjaminan mutu atas Pelatihan Latsar CPNS Tahun 2023 akan dituangkan dalam sebuah laporan setelah pelaksanaan pelatihan tersebut selesai.
2. Perancangan standar dan pedoman penjaminan mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023. Selanjutnya standar dan pedoman tersebut akan digunakan untuk melaksanakan penilaian/reviu atas kualitas penyelenggaraan PKP Tahun 2023 untuk menghasilkan output berupa Laporan Penjaminan Mutu PKP Tahun 2023.

Pelaksanaan penjaminan mutu tersebut suatu wujud penerapan budaya mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di Badiklat PKN. Budaya mutu tersebut

merupakan sistem nilai dari Badiklat PKN dalam menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Dalam implementasinya setiap unit kerja didorong untuk melakukan audit mandiri guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.

**Tabel 7. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 3 Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	50%	50%	37,5%	100%
Realisasi *)	N/A	50%	0%	0%	
Capaian	N/A	0%	0%	0%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	N/A	50%	0%	0%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 0% dari target sebesar 37,5%, sehingga capaiannya sebesar 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 belum memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh kegiatan penjaminan mutu masih dalam proses reuiu atas pelatihan Latsar CPNS Tahun 2023 yang sedang berjalan dan akan berakhir pada bulan Agustus 2023 dan penyusunan standar dan pedoman penjaminan mutu PKP Tahun 2023.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan Puserbang akan berupaya:

1. Melaksanakan penjaminan mutu berkelanjutan atas Latsar CPNS Tahun 2023 dan penjaminan mutu PKP Tahun 2023 melalui FGD atau meninjau langsung ke lokasi pelatihan;
2. Pengembangan aplikasi penjaminan mutu untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu;
3. Penajaman dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan belum memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Terkait capaian ini dialokasikan anggaran sebesar Rp285.011.000 dengan realisasi sebesar Rp79.786.500 atau 27,99%.

4. Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan

Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan adalah ketercapaian antara kegiatan pengembangan diklat dan pembimbingan yang ditetapkan dengan yang telah dilaksanakan. Indikator ini bertujuan

untuk mengukur ketercapaian atas pengembangan kediklatan dan pembimbingan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 kegiatan pengembangan kediklatan berada pada proses perancangan kuesioner dalam rangka pengumpulan data atas kajian terhadap salah satu komponen penerapan Corporate University. Selanjutnya Puserbang akan melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dengan melakukan kajian literatur, maupun FGD dengan narasumber atau pakar terkait. Hasil kajian akan dituangkan dalam sebuah laporan kajian yang akan diselesaikan pada triwulan III atau triwulan IV.

**Tabel 8. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 4 Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	N/A	50%	50%	37,5%	100%
Realisasi *)	N/A	0%	0%	0%	
Capaian	N/A	0%	0%	0%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	N/A	0%	0%	0%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 0% dari target sebesar 37,5%, sehingga capaiannya sebesar 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 belum memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh:

1. Kegiatan pengembangan kediklatan masih dalam proses pengumpulan data;
2. Ketersediaan bahan literatur berbagi ilmu dari para narasumber internal dan eksternal dari berbagai institusi melalui FGD;
3. Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan realisasi yang sesuai peruntukan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan Puserbang akan berupaya:

1. Melaksanakan FGD atau koordinasi secara langsung dengan instansi terkait dalam rangka mendapatkan informasi sebagai bahan penyusunan kajian;
2. Penajaman dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan belum memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Terkait capaian ini dialokasikan anggaran sebesar Rp266.242.000 dengan realisasi sebesar Rp30.404.000 atau 11.42%.

5. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas pemenuhan kebutuhan diklat adalah persepsi peserta diklat terhadap kebutuhan diklat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau usulan dari para pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan kediklatan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Evaluasi Level 1 - Reaksi mengukur sejauh mana peserta merasakan bahwa pelatihan yang diikutinya menyenangkan/menguntungkan, menarik, dan relevan. Tiga komponen dari Level 1 Reaksi adalah kepuasan pelanggan, keterlibatan peserta dan relevansi. Dalam hubungan dengan kepuasan pelanggan, sebelum seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk atau layanan, terlebih dahulu harus ada kesadaran akan kebutuhan terhadap suatu produk atau layanan. Kepuasan pelanggan menunjukkan bagaimana penyelenggara pelatihan memenuhi kebutuhan dan harapan dari peserta pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Level 1- Reaksi menyediakan data berkaitan dengan pelatihan yang efektif melalui pengukuran kualitas perancangan dan penyelenggaraan pelatihan.

**Tabel 9. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 5 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi *)	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	-	-	-	-	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Diklat Triwulan II Tahun 2023 belum dilaksanakan.

6. Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN

Pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan kerja sama terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengembangan kediklatan dhi mitra kerja Puserbang. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Puserbang Diklat PKN adalah persepsi mitra kerja Puserbang Diklat PKN dalam menjalin komunikasi dan kerja sama terkait pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengembangan kediklatan. Indikator ini bertujuan untuk memastikan terjalinnnya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengembangan kediklatan (Puserbang Diklat PKN) dengan para mitra kerja sama. Penilaian atas IKU ini dilakukan dengan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

**Tabel 10. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 6	Tahun
--------	-------

Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi *)	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	-	-	-	-	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Mitra Kerja Puserbang Diklat PKN Triwulan II Tahun 2023 belum dilaksanakan. Kegiatan terkait IKU ini dilaksanakan dengan melakukan survei dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Penilaian atas IKU ini dilakukan dengan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

**Tabel 11. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi *)	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	-	-	-	-	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Triwulan II Tahun 2023 belum dilaksanakan.

8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Penilaian berdasarkan hasil evaluasi Itama.

**Tabel 12. Indeks Hasil Evaluasi AKIP Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi *)	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	

Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	-	-	-	-	
--	---	---	---	---	--

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Indeks Hasil Evaluasi AKIP Triwulan II Tahun 2023 belum dilaksanakan

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan Big Data Analytics) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Aplikasi Manajemen Pengetahuan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi user untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penghitungan capaian kinerja IKU ini dilaksanakan oleh Biro TI atas pemanfaatan aplikasi di BPK, yaitu:

- a. SISDM
  - 1) LHKPN
  - 2) Tempat Tinggal
  - 3) SPT
  - 4) Informasi Pegawai
- b. JASMIN
  - 1) Log akses
  - 2) Tindak lanjut surat masuk

**Tabel 13. Indeks Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Trwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	50%	50%	100%
Realisasi *)	99,19%	99,19%	59,75%	98.73%	
Capaian	104.41%	103,32%	105%	105%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	99,19%	99,19%	59,75%	98.73%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 98,73% dari target sebesar 50%, sehingga capaiannya sebesar 105%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 telah memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan oleh pemanfaatan aplikasi JASMIN dan SISDM secara optimal dalam menyelenggarakan tuis Puserbang.



Untuk mempertahankan capaian atas IKU Indeks Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Puserbang akan berupaya:

1. Meningkatkan pemanfaatan SISDM;
2. Meningkatkan pemanfaatan JASMIN.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi telah melebihi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovative Prctice dapat direalisasikan melalui:

- a. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.
- b. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi.
- c. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Selama Triwulan I Tahun 2023 Puserbang melaksanakan Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif yang diikuti oleh Kepala dan Staf Bidang Evaluasi dan Pengembangan Diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam pengolahan dan analisis data dalam hubungan dengan penyelenggaraan evaluasi pasca pelatihan dan pengembangan kediklatan.

**Tabel 14. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Triwulan I Tahun 2020 - 2024**

IKU. 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0%	0%	0%	25 %	100%
Realisasi *)	0%	0%	0%	37,50%	

Capaian	0%	0%	0%	105%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	0%	0%	0%	37,50%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 37,5% dari target sebesar 25%, sehingga capaiannya sebesar 105%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 telah memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan/didukung oleh:

1. Komitmen dan usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dengan melaksanakan berbagai aktivitas manajemen pengetahuan sebagai bagian dari pelaksanaan tuisi;
2. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mendukung terlaksananya pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas dalam bentuk pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Puserbang akan berupaya:

1. Mengidentifikasi dan mengusahakan pelaksanaan praktik terbaik dalam penyelenggaraan tuisi Puserbang;
2. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan lain untuk mendukung pelaksanaan tuisi Puserbang;

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan telah memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

#### 11. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sebagaimana diatur dalam SPKN, Standar jam pelatihan bagi pemeriksa minimum 80 jam pendidikan dalam 2 (dua) tahun. Sedangkan untuk pegawai nonpemeriksa standar jam pelatihan minimum 20 jam pendidikan dalam 1 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Jumlah pegawai pada Puserbang pada Tahun 2022 sebanyak 18 orang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi jam minimum pelatihan, yaitu 20 JP.

**Tabel 15. Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020 - 2024**

IKU. 11 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50%	50%	50%	70%	100%

Realisasi *)	100%	70,59%	44%	95,24%	
Capaian	105%	105%	88,89%	105%	
Persentase Realisasi Tahun 20x2 terhadap Target Tahun 2024	100%	70,59%	44%	95,24%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 95,24% dari target sebesar 70%, sehingga capaiannya sebesar 105%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 telah memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan/didukung oleh komitmen manajemen dan staf Puserbang dalam mengembangkan kompetensi dan meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Puserbang akan berupaya mengikuti pelatihan atau workshop.

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi telah memenuhi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

## 12. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

- a. penyerapan anggaran;
- b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. pencapaian keluaran;
- d. efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Data terkait capaian IKU ini diperoleh dari penghitungan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan. Hasil penghitungan Biro Keuangan atas Kinerja Implementasi Anggaran pada Puserbang sesuai dengan ND Nomor 62/ND/X.4/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 85,82% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran 100%
- b. Capaian keluaran 100%
- c. Konsistensi 98,25%
- d. Nilai Efisiensi 51,54%

**Tabel 16. Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020 - 2024**

IKU. 12 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
Realisasi *)	82,21%	52,32%	90,12%	94,36%	
Capaian	99,05%	62,65%	105%	105%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	95,92%	61,05%	105,15%	110,11%	

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 94,36% dari target sebesar 84,5%, sehingga capaiannya sebesar 105%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Triwulan II Tahun 2023 telah memenuhi target.

Realisasi IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut disebabkan/didukung oleh pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam menyelenggarakan sertifikasi dan pengembangan diklat yang berkualitas sesuai peruntukannya, yaitu pelaksanaan FGD terkait penyusunan soal evaluasi dan sertifikasi dan FGD penjaminan mutu.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran Puserbang akan berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran telah melebihi target Triwulan II Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara – “Meningkatnya sertifikasi, akreditasi serta evaluasi dan pengembangan diklat yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya”, serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN dan efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Upaya efisiensi yang dilakukan antara lain:
  - a. Optimalisasi LMS dalam penyelenggaraan ujian dan proses penilaian menyebabkan efisiensi belanja ATK dan penggandaan soal ujian;
  - b. Penggunaan media zoom dalam penyelenggaraan rapat menyebabkan efisiensi belanja bahan jamuan rapat;
  - c. Penggunaan media zoom dalam penyelenggaraan koordinasi antar satker internal atau dengan instansi eksternal menyebabkan efisiensi belanja perjalanan dinas luar kota, perjalanan dinas dalam kota dan paket meeting;

- d. Penggunaan media zoom dalam penyelenggaraan FGD menyebabkan efisiensi belanja perjalanan dinas luar kota, perjalanan dinas dalam kota dan paket meeting dalam kota;
  - e. Penggunaan media zoom dan aplikasi LMS dalam penyelenggaraan ujian pelatihan dan ujian sertifikasi menyebabkan efisiensi belanja ATK, belanja penggandaan dan belanja perjalanan dinas luar kota;
  - f. Penggunaan media formulir daring dalam penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi level 3 dan 4 menyebabkan efisiensi belanja ATK dan belanja penggandaan.
2. Pengelolaan BMN
    - a. Peningkatan kapasitas sarana kerja dengan melaksanakan upgrade RAM pada unit komputer;
    - b. Mengganti laptop yang sudah tidak dapat bekerja maksimal dengan laptop yang baru dengan spesifikasi yang memadai;
    - c. Mengoptimalkan pemanfaatan server melalui maksimalisasi penyimpanan data pada media sharing untuk mengurangi beban penyimpanan pada unit komputer dan laptop;
    - d. Memperbaiki sarana kerja dengan mengganti roda kursi yang rusak.
  3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
    - a. Efisiensi perjalanan dinas luar kota, perjalanan dinas dalam kota dan paket meeting melalui pemanfaatan media zoom dalam melaksanakan koordinasi, rapat atau FGD;
    - b. Efisiensi belanja bahan jamuan rapat melalui pemanfaatan media zoom dalam melaksanakan rapat;
    - c. Efisiensi dengan melaksanakan revisi belanja bahan menjadi belanja jasa profesi untuk mengakomodasi pelaksanaan rapat, FGD, koordinasi melalui media zoom;
    - d. Efisiensi belanja ATK dan penggandaan melalui penyelenggaraan ujian pelatihan dan ujian sertifikasi secara daring menggunakan LMS dan media zoom.

#### **D. Perubahan Budaya Kerja**

Pencapaian kinerja mendapat pengaruh positif dari perubahan budaya kerja antara lain:

1. Keterlibatan teknologi dan informasi pada pelatihan dalam bentuk e-learning terutama berdampak secara positif terhadap biaya dan fleksibilitas pelaksanaan pekerjaan dengan cara antara lain:
  - a. memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan atau sertifikasi yang tersebar secara geografis untuk dapat mengikuti proses evaluasi dan sertifikasi;
  - b. melaksanakan pertemuan melalui FGD dengan para narasumber dalam proses penjaminan mutu, penyusunan kajian kediklatan, dan pengembangan aplikasi akreditasi.
2. Transformasi Badiklat menjadi BPK Corpu pada Tahun 2021 memberi pengaruh terhadap metode pembelajaran dengan mengadopsi model 70% experiential learning, 20% social learning dan 10% formal learning yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian metode evaluasi untuk dapat mengukur hasil pembelajaran peserta secara optimal.

#### **E. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya sertifikasi, akreditasi serta evaluasi dan pengembangan diklat yang berkualitas, bermanfaat dan terpercaya”, Puserbang

mengalokasikan dan merealisasikan anggaran guna memenuhi target dari capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023**

No	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1	373.633.000	0	Laporan Kegiatan Akreditasi Laporan Kegiatan Sertifikasi Eksternal	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi
2	906.370.000	180.485.562	Laporan Kegiatan Sertifikasi Profesi	
3	533.384.000	98.705.600	Laporan Kegiatan Uji Kompetensi Teknis	
4	778.616.000	239.175.000	Laporan Evaluasi Level 1, Level 2, Level 3 dan Level 4	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi
5	285.011.000	79.786.500	Laporan Penjaminan Mutu	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan
6	266.242.000	30.404.000	Laporan Kajian Kediklatan	Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio
7	136.683.000	3.150.000	Laporan Manajemen Internal	

#### F. Inovasi

Optimalisasi pencapaian output kinerja didukung oleh inovasi antara lain:

1. Koordinasi dengan Biro SDM dan Satker terkait pelaksanaan penilaian sikap perilaku terkait evaluasi pembelajaran;
2. Pemanfaatan grup sosial media untuk koordinasi dan diseminasi instruksi atau pedoman.

## Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Puserbang Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebesar 22,91% mengalami penurunan sebesar 15,4% dibandingkan Triwulan II Tahun 2022 dengan skor kinerja sebesar 38,31%.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Evaluasi
2. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
5. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu:

1. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Akreditasi
2. Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Rapor Kediklatan
3. Tingkat Pemenuhan Pengembangan Portofolio Pendidikan dan Pelatihan serta Metode Pembimbingan

Kondisi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni kegiatan masih berupa proses pelaksanaan, pengumpulan data dan penyusunan rancangan kegiatan berikutnya.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, Puserbang akan melakukan langkah-langkah melanjutkan dan menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi, penjaminan mutu dan pengembangan kediklatan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, unit/satuan kerja akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Menambah SDM;
2. Melaksanakan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi terkait metode pengolahan data dengan mengikuti pelatihan atau workshop.
4. Meningkatkan pemanfaatan TI;
5. Melaksanakan penajaman dan efisiensi anggaran.